

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang ditempuh dan dilaksanakan oleh pemerintah. Usaha yang ditujukan agar setiap lembaga pendidikan dapat memberikan jaminan mutu layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan mutu layanan yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Setiap satuan pendidikan selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan jaminan mutu secara terus menerus, maka yang diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan meningkat. Peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu dan sumber daya manusia secara signifikan dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus memiliki standar yang dilaksanakan secara nasional.

Akreditasi Sekolah yang dilaksanakan pada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Pelaksanaan akreditasi sekolah itu sendiri didasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 087/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002. Tentang Akreditasi Sekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039/O/2003. Tentang Badan Akreditasi Sekolah

Nasional (BASNAS). Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dilakukan terhadap seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, pada seluruh jenjang mulai Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). dan Sekolah Luar Biasa (SLB) pada semua tingkatan.

Ada tiga maksud utama dilaksanakannya akreditasi sekolah

1. Untuk kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dengan mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional beserta berbagai indikatornya.
2. Untuk Kepentingan akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan mereka.
3. Untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu, yakni sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait, baik sekolah, pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah.

Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak pengguna, maka mau dan harus ada yang dijadikan patokan. Setiap lembaga pendidikan secara bertahap berusaha untuk dikembangkan menuju pada pencapaian standar yang menjadi model acuan, model ini yang seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses maupun outputnya (kelulusannya). Jika suatu lembaga pendidikan telah mampu mencapai

standar mutu yang berstandar Nasional, maka diharapkan sekolah tersebut secara bertahap akan mampu dan bersaing dalam mencapai mutu yang kompetitif secara nasional pula. Dengan demikian mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan.

Setiap satuan pendidikan secara bertahap mengembangkan agar dapat menuju kepada pencapaian standar yang telah dibakukan. Apabila suatu lembaga pendidikan telah mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan lembaga pendidikan tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara nasional. Jadi pada dasarnya standar pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. PP No. 19/2005. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (pasal 86 ayat 3).

Pelaksanaan otonomi pendidikan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuntut adanya perubahan dalam sistem evaluasi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan dilakukan baik ditingkat satuan pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Pengawasan dan pembinaan sebagai

bagian dari manajemen yang harus dilaksanakan secara seimbang dengan fungsi manajemen agar dapat mencapai peningkatan kinerja satuan pendidikan. Berdasarkan Permen No 29/ 2005. Akreditasi S/M Adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu S/M. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya dijadikan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan (pasal 1 ayat 5)

Berangkat dari analisis tersebut untuk dapat membandingkan dari setiap satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan menggunakan instrument akreditasi yang komprehensif dan dikembangkan dengan standar mutu yang ditetapkan. Dari uraian di atas menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian secara mendalam tentang Analisis Kebijakan Akreditasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego Boyolali.

Sekolah Dasar Negeri 1 Klego Kabupaten Boyolali memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar-dasar bagi pengembangan sumber daya manusia yang bermutu. Meskipun demikian dalam pelaksanaan dan pelayanan tidak dapat optimal itu disebabkan keterbatasan dana, sarana prasarana, minimnya dukungan dari pihak-pihak terkait, manajemen yang kurang profesional, tata ruang sekolah , jumlah tenaga pengajar, tenaga administrasi, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta tidak adanya tenaga

kebersihan sekolah (penjaga sekolah). Kelemahan-kelemahan dari beberapa komponen serta kurangnya tenaga-tenaga tersebut, mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap Kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM) sehingga berakibat pula pada orang tua murid dalam menentukan pilihan sekolahnya serta rendahnya mutu lulusan yang berujung pada minimnya jumlah siswa di setiap kelas.

Jumlah siswa yang setiap tahunnya berkurang akan menjadikan beban bagi tenaga-tenaga pengajar di lembaga itu sendiri. Demikian juga antusias masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sangat kurang sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan kunci yang amat penting bagi lembaga itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam rangka menciptakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam pengendaliannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan yang salah satunya adalah kebijakan akreditasi sekolah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.

Dalam implementasinya kebijakan akreditasi ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kecenderungan yang dihadapi adalah minimnya dana serta waktu yang digunakan dalam melengkapi komponen-komponen yang dinilai dan tidak terlewatkan pula masalah obyektivitas, adil, transparan dan komprehensif dari asesor masih juga menjadi pertanyaan. Demikian juga terlalu cepatnya proses sosialisasi dan implementasi kebijakan akreditasi sekolah menimbulkan dampak pada jumlah siswa serta

rendahnya mutu pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks karena hal ini tidak dapat diselesaikan secara mendadak, perlu adanya langkah-langkah dan proses serta penelitian yang mendalam. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KLEGO BOYOLALI TAHUN 2011.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah untuk dapat dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan akreditasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego dilakukan ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan akreditasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego dilakukan ?
3. Bagaimana keadaan jumlah siswa sebelum dan sesudah implementasi kebijakan akreditasi di SD Negeri 1 Klego ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tentang profil sekolah dengan melalui proses sosialisasi implementasi akreditasi sekolah dan keadaan jumlah siswa. Sedangkan tujuan secara khusus adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses sosialisasi kebijakan akreditasi di Sekolah Dasar negeri 1 Klego atau program yang dilaksanakan berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan.

2. Untuk mendiskripsikan implementasi akreditasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego
3. Untuk mendiskripsikan keadaan jumlah siswa sebelum dan sesudah implementasi akreditasi di Sekolah dasar negeri 1 Klego Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khasanah kajian tentang akreditasi.

- a. *Sebagai Pengembangan mutu (Quality Improvement)*

Yang bermanfaat sekolah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

- b. *Sebagai Pengendalian mutu (Quality Control)*

Yang bermanfaat sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.

- c. *Sebagai Perlindungan masyarakat (Quality Assurance)*

Yang bermanfaat masyarakat dapat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga kepala sekolah dapat mempergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan, guna menentukan tingkat kelayakan suatu lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan.

2. Manfaat praktis :

Hasil akreditasi sekolah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Sedangkan hasil penelitian tentang akreditasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu kegiatan di sekolah.

- a. Bagi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Ka Sub dinas Pengembangan Profesi dan Pengawas Sekolah untuk dapat menentukan arah kebijakan yang tepat seperti penempatan, pemindahan guru dan tenaga kependidikan pada lokasi yang tepat.
- b. Bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagai masukan dan peningkatan kinerjanya untuk menjadikan dirinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
- c. Bagi masyarakat luas tentang hasil akreditasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sekolah yang menjadi pilihan keluarganya.

E. Definis Istilah

Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan cara bertindak tentang kelembagaan.

- Akreditasi : Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
- Kegiatan Penilaian : Kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
- Sekolah : Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya (dasar, lanjutan, tinggi).